

## **MEMBANGUN KEPERCAYAAN MENUJU INDONESIA MADANI, DEMOKRATIS DAN DAMAI (Sebuah Tinjauan Psikologi Sosial)\*)**

*Djamaludin Ancok*

### **A. PENGANTAR**

Tulisan ini sesuai dengan judulnya akan membahas masalah kepercayaan (*trust*) sebagai bahasan pokok dengan mengaitkannya pada upaya membangun masyarakat madani, demokratis dan damai. Pembahasan masalah kepercayaan ini menjadi sangat penting di saat Indonesia mengalami krisis multi dimensional. Tidak masuknya modal asing ke negara Indonesia adalah dikarenakan tidak adanya kepercayaan (*trust*) pada pemerintah Indonesia. Ketidakpercayaan pada keefektifan pemerintah Indonesia karena masing-masing elit politik lebih memikirkan kepentingan golongannya dari pada kepentingan untuk membangun bangsa. Kurangnya dukungan masyarakat pada pemerintah dikarenakan pemerintah sebelumnya telah memberikan bukti yang menggoyahkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Demikian pula halnya dengan kekerasan yang hidup dalam masyarakat yang berupa main hakim sendiri dikarenakan masyarakat sudah tidak percaya pada kemampuan aparat pemerintah di dalam menegakkan hukum.

### **B. KEPERCAYAAN (*TRUST*)**

Kepercayaan (*trust*) menjadi topik bahasan banyak pakar. Salah satu pakar yang mengangkat topik ini sebagai bahan diskusi yang hangat adalah Francis Fukuyama, seorang guru besar filsafat dari James Mason University, USA. Dalam buku yang berjudul *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity* (Fukuyama, 1995) penulis mendefinisikan *trust* sebagai berikut:

---

\*) Makalah dipresentasikan dalam Semi Loka Membangun Kepercayaan Menuju Indonesia Madani, Demokratis dan Damai. Diselenggarakan oleh Konsorsium Fakultas Psikologi. Hotel Hyat Yogyakarta, 20-21 Agustus 2001

*“the expectation that arises within a community of regular, honest, and cooperative behaviour, based on commonly shared norms, on the part of other members of that community”* (Fukuyama, 1995, hal 26).

Kepercayaan menjadi modal sosial (lihat Ancok, 1999, 2000) sebagai pengikat antar anggota masyarakat yang bekerja sama membangun sebuah masyarakat unggul. Dalam bahasa Fukuyama: kepercayaan memungkinkan orang untuk mengorganisasikan diri mereka ke dalam sebuah institusi yang inovatif. *Trust* dianggap Fukuyama sebagai sebuah mediator untuk terbentuknya institusi yang efektif.

Kepercayaan (*trust*) menjadi pengikat masyarakat. Pada masyarakat yang *‘low-trust’* ikatan kelembagaan/institusi diikat oleh keanggotaan dalam keluarga. Karena dalam ikatan keluarga *trust* tidak perlu dipermasalahkan. Anggota keluarga adalah bagian dari diri sendiri. Selain itu pada kelompok multi etnik, kepercayaan antar anggota etnik yang sama lebih mudah berkembang dari pada antar etnik. Berdasarkan asumsi seperti inilah ada pakar yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu bangsa akan lebih maju bila masyarakatnya memiliki suku yang homogen (lihat Scully, 1997). Fukuyama berpendapat bahwa *trust* berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam bukunya Fukuyama menulis seperti berikut: *“A nation’s well being, as well as its ability to compete, is conditioned by single, pervasive cultural characteristic: the level of trust inherent in the society”*. Selanjutnya ia menulis bahwa *“social capital represented by trust will be as important physical capital”* (Fukuyama, 1995, hal 26). Sejalan dengan pendapat Fukuyama, Robert D. Putnam menemukan dalam penelitiannya bahwa pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan di wilayah utara Italia berkorelasi dengan kehadiran *trust* di kalangan komponen masyarakat (lihat Ciancutti dan Steding, 2001, hal xiii). Selain pendapat yang disebut di atas ada pakar lain yang beranggapan bahwa *trust* berkorelasi dengan pertumbuhan kinerja ekonomi sebuah institusi. Renolds (1997) berpendapat bahwa *trust* adalah modal yang harus dimiliki sebuah organisasi agar berkinerja baik, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat untuk semua pihak.

### **C. MASYARAKAT MADANI DAN DEMOKRATIS**

Banyak pakar yang mengemukakan pendapat tentang karakteristik masyarakat madani (*civil society*), dan sudah cukup banyak literatur yang membahas masalah ini (lihat misalnya Chandoke, 1995; Giddens, 1998; Soros, 1998).

Menurut pandangan saya masyarakat madani dan demokratis memiliki ciri sebagai berikut:

*1. Masyarakat yang bebas dari penindasan (opresi)*

Banyak penindasan yang dilakukan di dalam masyarakat, antara lain adalah penindasan para penguasa pada rakyatnya, penindasan oleh pemilik modal pada mereka yang tidak bermodal, penindasan oleh negara berkuasa pada negara yang lemah, penindasan oleh mereka yang mempunyai pengetahuan pada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan.

*2. Masyarakat yang bebas dari rasa takut*

Kebebasan akan rasa takut tersebut meliputi bebas dari rasa takut akan diculik, dihukum, atau dihabisi nyawanya oleh oknum negara dikarenakan oleh perbedaan pendapat dengan pihak penguasa. Bebas dari rasa takut akan teror yang ditebarkan oleh pihak lain pada anggota masyarakat yang dianggap berbeda pandangan politik, kepercayaan dan agama. Bebas dari rasa takut akan ancaman dari suku, agama atau kelompok lain yang berbeda.

Pada era orde baru ketakutan akan dipenjara, diculik dan “dihilangkan” sangat besar. Beberapa aktivis mahasiswa telah menjadi korban penculikan bahkan sebagian dari mereka tidak diketahui di mana keberadaannya. Banyak ilmuwan yang tidak berani mengkritik pandangan pemerintah karena takut dituduh melakukan tindakan subversif. Beberapa mahasiswa dan aktivis diculik karena dianggap membahayakan kepentingan penguasa.

*3. Bebas dari perlakuan diskriminatif di muka hukum maupun hak-hak pribadi*

Dalam sebuah masyarakat madani tugas sebuah pemerintah adalah membangun komitmen pada kebersamaan dengan menghilangkan diskriminasi berdasarkan ikatan primordial. Pandangan seperti ini dikemukakan oleh Bridges (1997, hal.1) seperti berikut:

*In a liberal democracy, the state is committed to treat all citizens as free individuals and to treat all individuals as equals. For such a regime to be intelligible to the governed, the members of a liberal political community must, to some extent at least, come to see themselves and one another as free and equal individuals. This means that they must see themselves and others as not entirely defined and encompassed by family, ethnic or religious identifications. This means that they must be able, at least for certain purposes and on certain occasions, to put aside measures of human worth based on those family, ethnic and religious identifications and adopt a very different ranking system, one based on their identification as citizens.*

Pandangan di atas kelihatannya sangat ekstrim. Institusi yang paling kuat dalam membentuk masyarakat adalah keluarga, kerabat, suku, dan agama. Namun demi terbangunnya sebuah masyarakat madani yang demokratis orang harus berani memomorduakan identifikasinya pada institusi primordial dan mengidentifikasinya hanya pada kepentingan bersama tanpa melihat ikatan primordial.

Pada negara yang multi kultur, multi agama, dan multi golongan seringkali terjadi perilaku yang mendiskriminasi suatu golongan. Sebagai contoh di Indonesia warga keturunan diwajibkan untuk memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, walaupun mereka sudah turun temurun lahir di Indonesia. Pernah juga terjadi diskriminasi terhadap pemeluk agama tertentu untuk melakukan ibadah sesuai dengan kemauan mereka. Berlakunya UU. no. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah terasa mulai ada pengaruhnya terhadap diskriminasi suku. Pengutamaan putra daerah dalam jabatan pemerintah ataupun peluang ekonomi adalah salah satu bentuk diskriminasi atas orang dari suku luar.

Suatu negara demokratis tidak mendiskriminasikan warganya untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, politik, dan agama. Selain itu tidak ada diskriminasi dalam pemberian kesempatan untuk bekerja dan memperoleh pendidikan. Diskriminasi adalah sebuah tindakan tidak adil yang akan membuat orang merasa tidak memiliki negara ini. Bila perasaan diperlakukan tidak adil ini dipelihara terus maka jangan diharapkan masyarakat yang terdiskriminasi akan terlibat dalam pembangunan.

#### *4. Masyarakat yang transparan dalam proses berbangsa dan bernegara*

Masyarakat berhak mengetahui kegiatan pemerintah, penganggaran, dan kemana dana dihabiskan. Masyarakat harus diberi tahu secara transparan atas segala penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat negara.

Dalam sejarah Indonesia setelah merdeka kasus korupsi tidak pernah dibuka pada masyarakat secara transparan. Temuan-temuan BPK, BPKP hanya disimpan dan tidak ditindak lanjuti secara hukum. Kalau sekiranya dibuka pada publik, masyarakat bisa melakukan upaya tuntutan hukum. Upaya untuk menutupi kasus korupsi ini disertai dengan penekanan pada lembaga pers melalui pemberangusan.

Dalam suatu masyarakat madani tidak ada pemberangusan terhadap pers. Pers menjadi alat kontrol karena diberikan kebebasan untuk membuka informasi secara transparan pada masyarakat. Selama informasi yang disampaikan adalah benar (tentu saja dengan pertimbangan keselamatan rakyat, bukan pejabat) maka tidak ada pelarangan pemberian informasi pada rakyat oleh pers.

Pada era orde baru melalui Departemen Penerangan banyak koran dan majalah yang dilarang terbit karena menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan selera penguasa.

##### *5. Pemerintah yang bermitra dengan masyarakat*

Kegairahan anggota masyarakat di dalam kegiatan pembangunan yang konstruktif ditentukan oleh sejauh mana mereka diajak berpartisipasi sebagai mitra, sejak perencanaan pembangunan sampai pada pelaksanaan serta evaluasi hasilnya. Giddens (1998) melihat kemitraan antara masyarakat dan pemerintah ini adalah salah satu ciri dari masyarakat madani. Pandangan seperti ini amat ditekankan pula oleh penulis buku *Reinventing Government* (Osborne & Gaebler, 1992) yang menuntut agar pemerintah memberdayakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, pemerintah hanya mengarahkan masyarakat bukan menggiring masyarakat atas kemauan pemerintah, dan pemerintah memberi wewenang kepada masyarakat bukannya memberikan segala atas kemauan pemerintah.

Pada rezim orde baru pembangunan selalu dikuasai oleh Pemerintah. Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh negara. Masyarakat diletakkan dalam posisi yang sangat lemah. Pemerintah, melalui proyek Bantuan Presiden dan berbagai program lainnya, seakan-akan menjadi sinterklas yang memberikan segalanya kepada rakyat. Pembangunan sangat sentralistik, semuanya diatur dari Pusat. Pendekatan pembangunan seperti ini didasari oleh asumsi bahwa masyarakat itu bodoh dan tidak kreatif. Banyak pranata sosial tradisional yang justru sangat efektif di dalam mengatasi kesulitan bersama dihancurkan oleh pendekatan pranata yang baru melalui kegiatan PKK atau P2KSS. Lembaga tradisional yang dibangun masyarakat seperti lumbung paceklik, perkumpulan kematian, perkumpulan yasinan (baca Al-Quran), perkumpulan distribusi air pengairan, banyak yang menjadi hilang (lihat Ancok, 1987).

Menurut pandangan psikologi lembaga yang dibangun sendiri oleh anggotanya akan memiliki nilai intrinsik yang tinggi. Orang termotivasi karena adanya faktor suka dengan keterlibatan dalam organisasi tersebut. Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dengan janji-janji akan memperoleh dana bagi kegiatan anggota kelompok akan menghilangkan motivasi intrinsik tersebut, dan beralih ke motivasi ekstrinsik (dapat dana). Banyak penelitian psikologi yang membuktikan kebenaran asumsi ini (lihat: Lepper & Green, 1975). Selain itu berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan sejak perencanaan sampai dengan evaluasi hasil pembangunan akan menimbulkan rasa memiliki pembangunan (*sense of ownership*).

#### 6. Masyarakat madani adalah masyarakat yang membangun kepedulian (*caring*).

Kepedulian (*caring*) adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh siapa saja. Kepedulian ini dinyatakan pada kepedulian atas sesama, kepedulian si kaya pada si miskin, kepedulian mereka yang memiliki kesempatan pada kekuasaan atas mereka yang tidak memilikinya, kepedulian pada kelestarian lingkungan, dan kepedulian pada aturan norma hidup bermasyarakat (*ethnics*). Tujuan membangun sebuah komunitas (termasuk negara) adalah untuk mensejahterakan setiap anggota komunitas tersebut. Program sosial yang berasal dari masyarakat untuk masyarakat seperti *community development* (pengembangan masyarakat) yang disponsori oleh kalangan industri adalah contoh dari kepedulian tersebut. Selain itu membangun institusi bisnis yang berdasarkan etika bisnis adalah salah satu wujud dari kepedulian. Kepedulian para pengusaha menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan sistem kapitalis akan membuat orang menjadi serakah dan hanya menjadi binatang ekonomi saja. Kritik tajam atas sistem kapitalis yang tidak memiliki kepedulian ini dengan gamblang disampaikan oleh banyak pakar (lihat Korten, 1995). Sistem kapitalis telah membuat orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin, dan membuat kerusakan lingkungan yang sangat besar. Adalah tidak adil kalau pihak korporasi menjadi kaya raya dengan melakukan perusakan lingkungan dan pemiskinan masyarakat.

#### D. Kepercayaan (*trust*) dalam perspektif psikologi

Dengan asumsi bahwa *trust* adalah suatu yang menyenangkan (*reward*) dan *distrust* sesuatu yang tidak mengenakan (*punishment*) maka *trust* akan sangat besar perannya sebagai pengikat hubungan antar manusia. Hubungan dalam perkawinan akan terganggu bila tidak ada *mutual trust* antar suami isteri. *Distrust* (ketidakpercayaan) adalah penyulut terjadinya percecokan suami isteri yang akhirnya bermuara pada perceraian. Demikian pula dengan institusi lain seperti persekutuan dagang, kerjasama kelembagaan, atau kehidupan bermasyarakat.

Paling sedikit ada beberapa teori/konsep psikologi yang terkait dengan permasalahan *trust*, yakni: *equity theory* (*fairness*), *self fulfilling prophecy*, dan *positive/negative bank account*.

##### a. *Equity Theory*

Menurut pandangan kelompok pakar pendukung teori ekuiti (*equity theory*) hubungan antar manusia didasarkan pada prinsip tukar menukar antar *input* dan *output*

(lihat Adams, 1963). *Input* adalah hal-hal yang diberikan pada orang lain dalam sebuah transaksi, sedangkan *output* adalah hal-hal yang diperoleh dari sebuah transaksi. Bila transaksi ini tidak memuaskan karena salah satu pihak yang berbeda dalam transaksi tidak memperoleh apa yang diharapkan maka terjadilah upaya untuk mengembalikan situasi yang *in-equitable* menjadi *equitable*. Dengan asumsi bahwa *trust* yang diberikan adalah *input*, maka pihak yang memberikan *trust* juga mengharapkan *trust* yang seimbang besarnya dengan yang diberikan.

Ada berbagai cara untuk mengembalikan ketidakseimbangan dalam *trust* ini. Bila suatu pihak merasakan bahwa *trust* yang seharusnya dimiliki tidak diperoleh maka salah satu cara untuk menimbulkan perasaan *equitable* adalah dengan berbuat sesuatu yang diasumsikan mengembalikan situasi ke arah *equitable*. Misalnya dengan melakukan kegiatan kekerasan yang merugikan pihak lain yang telah menyalahgunakan *trust* yang diberikan.

### ***b. Self-fulfilling prophecy***

*Trust* adalah hasil dari sebuah interaksi mutual. Bila satu pihak memperlakukan pihak lain dengan cara yang tidak *trustful*, maka sifat *trustful* akan dikonfirmasi oleh pihak lain. Sebagai contoh bila seorang pejabat sebagai wakil negara memperlakukan rakyatnya dengan tidak percaya (*distrustful*) maka sikap tidak percaya itu akan dikonfirmasi dengan perilaku yang *distrustful* pula. Fenomena seperti ini yang disebut dengan *self-fulfilling prophecy*, yakni harapan seseorang tentang sikap dan perilaku kita akan kita wujudkan dalam kenyataan sesuai dengan harapan orang lain itu (lihat Rosenthal, 1966). Di saat zaman rezim orde baru banyak sekali lembaga intelijen yang dibangun. Intel berseliweran dalam kehidupan kita mulai dari intel kepolisian, intel Direktorat Sospol Depdagri, BAKIN, BIA, BAIS, dan intel Kejaksaan. Asumsi dasar kegiatan intelijen ini adalah ketidakpercayaan pada rakyat. Rakyat dianggap sebagai musuh negara dan rakyat harus diawasi karena mereka akan melakukan kegiatan yang melawan negara. Asumsi yang keliru terhadap rakyat ini yang kemudian dikonfirmasi rakyat dengan perilaku yang betul-betul melawan negara dengan menjatuhkan sebuah rezim.

### ***c. Positive-Negative Bank Account***

Perilaku baik seperti kepedulian, empati, menolong orang lain adalah perilaku yang menyenangkan orang lain. Menanamkan kepercayaan pada orang lain adalah salah satu bentuk perilaku yang menyenangkan bagi orang lain. Makin banyak kita memberikan perilaku yang demikian pada orang lain, maka makin besar tabungan

emosi yang positif (*positive emotional bank account*) yang kita miliki. Perilaku yang sebaliknya, seperti perilaku yang menyinggung perasaan orang lain, menghina orang lain, atau tidak percaya pada orang lain akan membuat orang tidak senang pada kita. Perilaku yang demikian jika makin banyak kita lakukan, akan membuat tabungan emosi yang negatif (*negative emotional bank account*). Pandangan seperti ini dikemukakan oleh Stephen R. Covey dalam buku *Seven Habits of Highly Effective People* (1986).

Bila seseorang menggunakan tabungan emosi yang positif dalam berinteraksi dengan orang lain, diharapkan orang lain akan membalasnya dengan tabungan emosi yang positif pula. Hubungan dengan orang lain akan berbentuk hubungan *win-win* (sama-sama menang). Tetapi bila tabungan emosi yang negatif yang diberikan maka hubungan dengan orang lain akan menjadi hubungan *win-lose* (menang-kalah), yang kemudian dibalas menjadi hubungan *lose-lose* (kalah-kalah).

### **E. Kepercayaan dan Kedamaian menurut Perspektif Psikologi**

Berdasarkan prinsip psikologi yang dikemukakan di atas, bila *trust* dianggap sebuah komoditas transaksi, maka *trust* akan dibalas dengan *trust* dan *distrust* akan dibalas dengan *distrust*. Bila terjadi ketidakseimbangan antara *trust* yang diperoleh dengan *trust* yang diberikan maka sulit kedamaian akan timbul.

Unjuk rasa dan perilaku kekerasan adalah wujud dari perasaan diperlakukan tidak adil (*inequity*). Pemerintah yang seharusnya membagikan hak-hak masyarakat, tetapi oleh oknum pejabat pemerintah hak masyarakat tersebut dikorupsi untuk kepentingan diri sendiri, keluarga dan golongan. Demikian pula dengan *trust* yang diberikan oleh suatu kelompok (suku, agama, dan golongan) dalam masyarakat yang diganti dengan perilaku yang tidak sesuai dengan *trust* yang diberikan akan menimbulkan konflik dan perseteruan fisik antar kelompok tersebut. Kasus konflik antar suku di suatu wilayah antara suku pendatang dan suku lokal dapat disebabkan oleh perasaan *trust* yang diperoleh tidak memadai. Pada kalangan pengusaha, orientasi terhadap keuntungan dengan tidak mempedulikan etika bisnis dan tanggung jawab sosial adalah sebuah transaksi yang sangat tidak adil bagi masyarakat.

Perbuatan pejabat pemerintah, pengusaha, dan komponen masyarakat yang demikian ini akan mendapat balasan melalui kegiatan inkonstitusional berupa unjukrasa dan kekerasan. Dalam perspektif teori ekuiti kegiatan unjuk rasa dan kekerasan adalah upaya untuk mengembalikan *in-equity* menjadi *equity*.

Dari pandangan teori kebutuhan berhirarki (*the hierarchy of need theory*) yang dikemukakan oleh Abraham Maslow (1954) kedamaian dalam arti kata sesungguhnya baru akan muncul apabila semua kebutuhan mulai dari kebutuhan fisiologis sampai dengan kebutuhan aktualisasi diri terpenuhi. *Trust* adalah salah satu aspek kebutuhan yang berada pada hirarki ke tiga kebutuhan akan kasih sayang (*need for love*) dan hirarki ke empat kebutuhan akan penghargaan (*self-esteem*). Perasaan dipercaya akan membuat orang melihat orang lain respek pada dirinya dengan menganggap orang lain adalah bagian darinya. Pemberian *trust* oleh orang lain akan membuat orang lain dipersepsi sebagai orang yang peduli pada orang lain. Sama halnya dengan harga diri (*self-esteem*). Merasa dipercaya orang akan menumbuhkan harga diri. Harga diri yang positif akan dipertahankan dengan cara berbuat baik pada orang lain dan mencegah diri dari perbuatan tercela. Bila semua komponen masyarakat berbuat demikian maka akan damailah kehidupan manusia.

## **F. Membangun Kepercayaan**

Kepercayaan harus dibangun oleh semua pihak pada setiap institusi kehidupan, mulai dari institusi keluarga, institusi pendidikan, institusi masyarakat, dan institusi pemerintah. Hanya melalui visi dan komitmen bersamalah kepercayaan bisa dibangun.

Pada dasarnya upaya membangun kepercayaan harus dimulai dari membangun sistem yang bercirikan adanya kompetensi, keterbukaan, reliabilitas, dan keadilan (lihat Reynolds, 1997).

### **1. Kompetensi (*competence*)**

Kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan tugas yang diperankan pada diri seseorang. Seorang menteri, anggota DPR atau pejabat negara lainnya baru akan dipercaya oleh masyarakat yang dipimpinnya apabila memiliki kompetensi di bidang yang menjadi tugasnya. Demikian pula dengan kepemimpinan di organisasi lain seperti parpol, ormas, atau komunitas. Kalau melihat proses politik yang terjadi di Republik Indonesia, rekrutmen elit politik belum memenuhi standar kompetensi yang diharapkan. Banyak anggota DPR yang belum cukup kaya pengalaman politik, tiba-tiba muncul menjadi tokoh sentral dalam kelembagaan negara karena keterlibatannya sebagai fungsionaris parpol. Pada level Kabupaten banyak anggota DPRD yang tidak menamatkan pendidikan tingkat SLTA. Solusi terhadap masalah ini adalah kemampuan partai politik untuk menyusun suatu sistem rekrutmen tokoh politik yang betul-betul baik dari segi pendidikan, pengalaman, dan kearifan. Jangan sampai

seorang aktivis yang rajin ikut kampanye serta merta dijadikan calon elit politik yang mengurus negara ini.

## **2. Keterbukaan (*openness*)**

Keterbukaan atau sifat transparansi tidak menutup-nutupi informasi tentang apa yang dilakukan oleh seseorang dalam urusan bernegara dan berbangsa adalah suatu syarat mutlak untuk tumbuhnya kepercayaan. Keberanian elit politik untuk mengumumkan harta milik mereka di saat mereka menjadi pejabat adalah salah satu wujud keterbukaan. Upaya untuk menutupi ketidakbenaran hanya menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat. Seorang pejabat harus berani dikritik dan menerima kritik sebagai sebuah masukan untuk kemajuan bersama. Sangat sering terjadi hilangnya kepercayaan karena kasus yang ditutup, yang sebenarnya kasus tersebut sudah diketahui oleh masyarakat banyak. Munculnya LSM yang bertujuan untuk membangun transparansi seperti *Parliament Watch*, *Government Watch* sangat perlu dikembangkan untuk menumbuhkan perilaku yang menjurus pada perilaku yang mendapat kepercayaan. Namun usaha kelompok LSM ini masih perlu ditopang oleh penegakan hukum yang layak tanpa pilih kasih. Kalau tidak didukung oleh penegakan hukum, sangat dikhawatirkan apa yang mereka suarakan justru akan makin menumbuhkan ketidakpercayaan pada aparat.

## **3. Reliabilitas (*Reliability*)**

Reliabilitas terlihat dari sejauh mana adanya keserasian antara kata dan perbuatan (*walk the talk*). Di saat rakyat hidup dalam penderitaan ada pejabat sibuk mengurus kepentingan diri sendiri seperti minta disediakan mobil baru dan luks untuk mobil dinas, padahal mobil yang ada masih sangat memadai. Sangat sulit untuk menumbuhkan kepercayaan pada pengelola negara bila perilaku mereka masih seperti itu. Kepercayaan akan mudah timbul di mata masyarakat kalau pimpinan justru menunjukkan keinginan untuk berkorban. Banyak pemimpin perusahaan mampu menyelamatkan perusahaan yang sakit karena pemimpin menunjukkan pengorbanannya untuk perusahaan dengan memotong gajinya sendiri, atau memutuskan tidak akan menerima gaji beberapa bulan. Sebagai contoh adalah CEO perusahaan mobil Chrysler yang bernama Lee Iacocca yang berhasil mengubah perusahaan yang hampir bangkrut menjadi perusahaan sehat, dengan memutuskan untuk menerima gaji satu dollar saja.

#### **4. Keadilan (*equity*)**

Perlakuan adil adalah dambaan setiap orang. Rakyat mengharapkan pimpinan yang adil. Kata adil ini sendiri sudah dimasukkan ke dalam falsafah negara Pancasila, yang berupa “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, dan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Kata-kata adil adalah kata-kata yang banyak ditulis dalam kitab suci. Keadilan di dalam bidang hukum, ekonomi dan politik adalah hal yang masih perlu diperjuangkan di Indonesia.

Ketidakadilan masih merupakan fenomena yang menonjol di Indonesia. Sebagai contoh, ketidakadilan dalam perlakuan hukum: orang yang punya kekuasaan lebih besar peluangnya untuk tidak tersentuh hukum, dibandingkan dengan orang yang tidak punya kekuasaan.

Upaya membangun kepercayaan sebagai modal untuk membangun negara yang penuh kedamaian harus dilakukan semua institusi yang ada, yakni keluarga, pendidikan, masyarakat dan negara. Untuk melakukan ini semua diperlukan adanya visi bersama. Visi adalah cita-cita bersama dalam membangun negara, yang ingin melihat negara ini menjadi negara yang seperti apa, yang lebih baik dari kondisi sekarang ini. Visi ini harus disusun atas keinginan semua pihak bukan disusun dari atas untuk melayani kepentingan bersama. Visi yang merupakan milik bersama akan mudah untuk disosialisasikan. Tentu saja secara teknis tidaklah mudah untuk membangun visi bersama dengan melibatkan semua pihak. Namun dengan meminta masukan dan tanggapan atas visi yang disusun oleh sekelompok elit akan lebih memudahkan untuk membuat suatu visi dimiliki bersama. Upaya menyadarkan setiap insan bahwa keanekaragaman adalah sumber kekuatan di dalam membawa negara pada kemajuan harus dilakukan bersama dengan usaha yang tidak henti-hentinya. Hanya dengan kebersamaanlah semua keinginan akan menjadi kenyataan. Bila visi diturunkan dari atas tanpa melibatkan kebersamaan akan menghantarkan visi tersebut pada kegagalan. Visi yang hanya diturunkan dari atas akan sangat sulit untuk disosialisasikan. Contohnya penataran P-4 adalah sesuatu yang diturunkan dari atas, bukan dibangun oleh masyarakat sendiri dan akhirnya menjadi alat kekuasaan untuk menekan rakyatnya.

Pendidikan keluarga tentang membangun *trust* kini semakin sulit dilakukan di saat kompleksitas kehidupan telah melemahkan sendi-sendi kehidupan keluarga. Makin banyak anak yang terlepas dari pengawasan orangtuanya dikarenakan kesibukan orangtua mencari nafkah, atau ditinggal pergi oleh orangtuanya yang tidak bertanggung jawab.

Pendidikan *trust* melalui institusi pendidikan juga makin sulit. Kini makin banyak lembaga pendidikan yang melanggar etika profesional dengan menjual ijazah palsu. Kini situasi pendidikan makin memperhatikan lagi karena makin banyak pejabat negara dan pemuka masyarakat yang suka membeli gelar palsu, seperti doktor dan profesor palsu. Upaya untuk pelarangannya menjadi makin sulit karena tidak ditanggapi secara serius oleh pejabat negara karena keterlibatan mereka dengan membeli gelar palsu.

Pendidikan masyarakat untuk menanamkan rasa saling percaya (*mutual trust*) juga tidak mudah, karena banyaknya contoh-contoh kejadian dalam interaksi sosial yang menggoyahkan sendi saling percaya. Tidak adanya penyelesaian hukum dalam kasus bentrok antar suku membuat saling percaya semakin sulit dibangun.

Namun demikian kita tidak harus pesimis. Mesti ada cara untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Bila seseorang mulai membangun dari diri sendiri tentang kehidupan berdemokrasi yang penuh damai, mungkin akan menular pada orang lain di sekitarnya. Siapa tahu suatu ketika seluruh bangsa ini akan berhasil belajar untuk hidup bersama secara damai dengan rasa saling percaya satu dengan lainnya.

## **G. Penutup**

Tulisan singkat ini mencoba untuk menganalisis sekelumit faktor psikologi dalam upaya untuk membangun kepercayaan sebagai prasyarat tumbuhnya sebuah negara demokratis dan damai. Topik ini terlalu besar untuk dapat dibahas dalam makalah yang sangat singkat ini. Namun tidaklah berlebihan kiranya untuk mengharap tulisan ini akan menjadi bahan renungan buat kemajuan ilmu psikologi di dalam membangun masyarakat madani yang penuh damai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adams, J.S. (1963). Toward an understanding of inequity. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, vol. 67, hal 422-426.
- Ancok, D. (1987). *The Role of Traditional Organization in Family Planning in Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, UGM.
- \_\_\_\_\_, (1998). Membangun Kopetensi Manusia dalam Milenium Ketiga. *Psikologika*. No. 6, 5-17.

- \_\_\_\_\_. (2000). Tantangan Milenium Ketiga dan Institusi Pendidikan Psikologi. *Psikologika*, No. 9, 5-16.
- Bridges, T. (1997) Essay-2: The Rhetorical Analysis of Civic Culture dalam *Civic Culture: What it is*. Philosophy and Civil Society Home Page.
- Chandoke, D. (1995) *State and Civil Society*. New Delhi: Sage Publication.
- Ciancutti, A. & Steding, T.L. (2001). *Built on Trust: Gaining Competitive Advantage in Any Organization*. Chicago: Contemporary Books.
- Covey, S.R. (1988) *Seven Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change*. New York: Simon & Schuster.
- Giddens, A. (1998) *The Third Way* (terj.) Jakarta: Gramedia.
- Fukuyama, F. (1995) *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York: Free Press.
- Korten, D.C. (1997) *When Corporations Rule the World*. (terj.) Jakarta: Professional Books.
- Lepper, M.R. and Green, D. (1975). Turning Play Into Work: Effect of Adult Surveillance and Extrinsic Rewards on Children's Intrinsic Motivation, *Journal of Personality and Social Psychology*, 31, 479-486.
- Osborne, D. dan Gaebler, T. (1992) *Reinventing Government*. Reading: Addison-Wesley.
- Maslow, A. (1954). *Motivation and Personality*. New York: Harper.
- Reynolds, L. (1997). *The Trust Effect: Creating the High Trust and High Performance Organization*. London: Nicholas Brealey Publishing.
- Rosenthal, R. (1966). *Experimenter Effects in Behavioral Research*. New York: Appleton.
- Scully, G. (1997). *Multiculturalism and Economic Growth*. NCPA Policy Report No. 196.
- Soros, G. (1998). *The Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangered*, London: Little, Brown and Company.